

ABSTRAK

ABD. HAMIM ANSORI, Analisis Produk Hukum Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di bawah Bimbingan: Helmy Boemiya, S.H., M.H.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana produk hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten sampang pada masa pandemi covid19 sehingga dapat ditundanya pelaksanaan pemilihan kepala desa hingga 2025. Sebagai mana landasan hukum UUD NRI 1945, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati Sampang.

Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian skripsi ini serta menghubungkan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi sebab ditundanya pemilihan kepala desa di Kabupaten Sampang adalah adanya virus non alam (*Corona Virus Disease 2019*) yang tidak dapat di kendalikan sehingga pemerintah pusat mengambil Kebijakan/Tindakan untuk menunda pemilihan kepala desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ditujukan terhadap Bupati/Walikota dengan mengeluarkan Surat keputusan di daerah masing-masing terutama di Kabupaten Sampang. Dalam penundaan tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi penetapan penundaan Pilkades sampai 2025 masih belum sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang menjadi hukum positif di Indonesia diatur Dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Kata kunci: Produk Hukum, Pilkades, AUPB.

ABSTRACT

ABD. HAMIM ANSORI, *Analysis of Legal Products Regarding the Implementation of Village Head Elections Based on General Principles of Good Governance, Legal Studies Program, Faculty of Law, Trunojoyo University Madura. Under Guidance: Helmy Boemiya, SH, MH*

The purpose of this research is to find out and understand how the legal product for implementing the village head election in Sampang district during the COVID-19 pandemic so that the implementation of the village head election can be postponed until 2025. As a legal basis for the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, UU no. 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulations, Minister of Home Affairs Regulations, Regional Regulations, Regent Regulations, and Sampang Regent Decree.

The research in this thesis is a normative research using the Statute Approach, by examining all laws and regulations that have to do with the issues that are the object of this thesis research and linking views and doctrines in law.

The results showed that the reason for the postponement of the village head election in Sampang Regency was the presence of a non-natural virus (Corona Virus Disease 2019) that could not be controlled so that the central government took a policy/action to delay the village head election as regulated in a Government Regulation aimed at the Regent. /Mayor by issuing decrees in their respective regions, especially in Sampang Regency. The postponement can be justified, but the determination to postpone the Pilkades until 2025 is still not in accordance with the General Principles of Good Governance (AUPB) which is a positive law in Indonesia as regulated in Article 9 of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration.

Keywords: Legal Products, Pilkades, AUPB.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.4.1. Kegunaan Secara Teoritis	8
1.4.2. Kegunaan Secara Praktis	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Jenis Penelitian	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.5. Analisi Bahan Hukum	16

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	18
2.1.	Konsep Desa	18
2.2.	Konsep Pemilihan Kepala Desa	20
2.3.	Kerangka Teoritis	25
2.3.1.	Teori Pembentukan Perundang-undangan	25
2.3.2.	Teori AUPB	28
BAB III	ANALISIS PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO. 188.45/272/KEP/434.013/2021 BERDASARKAN ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK	37
3.1.	Pengaturan Terkait Hukum Positif Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Masa Pandemi Covid-19	37
3.2.	Analisis Produk Hukum Surat Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434.013.2021 Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).....	42
3.2.1.	Asas Kepastian Hukum	44
3.2.2.	Asas Kemanfaatan	44
3.2.3.	Asas Ketidakberpihakan.....	45
3.2.4.	Asas Kecermatan	46
3.2.5.	Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang	47
3.2.6.	Asas Keterbukaan.....	48
3.2.7.	Asas Kepentingan Umum.....	48
BAB IV	PENUTUP	55
4.1.	Kesimpulan	55
4.2.	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		57

DAFTAR TABEL

Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya	10
Hierarki Pengaturan terkait hukum positif pelaksanaan pemilihan kepala desa dimasa pandemi.....	40
Hasil Analisis Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 Berdasarkan AUPB	49